



Buku - 2

---

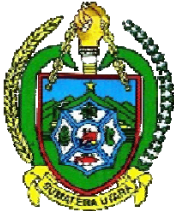
**ENAM AGENDA EKONOMI DAN PRIORITAS PROGRAM  
KABINET INDONESIA BERSATU UNTUK  
KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN MASYARAKAT  
DI SUMATERA UTARA 2005**

Disampaikan dalam rangka  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)  
Provinsi Sumatera Utara

Medan, 12-13 April 2006

---

***BPS*** **Badan Pusat Statistik**  
**Provinsi Sumatera Utara**



Buku - 2

---

**ENAM AGENDA EKONOMI DAN PRIORITAS PROGRAM  
KABINET INDONESIA BERSATU UNTUK  
KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN MASYARAKAT  
DI SUMATERA UTARA 2005**

**Disampaikan dalam rangka  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)  
Provinsi Sumatera Utara**

**Medan, 12-13 April 2006**

---

***BPS* Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Utara**

## KATA PENGANTAR

Tuntutan reformasi pembangunan adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Tuntutan ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti kehidupan masyarakat yang lebih merata, otonom dan terbuka, serta berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan. Strategi pembangunan nasional akan lebih mempertimbangkan potensi dan dinamika perkembangan daerah dan wilayah.

Pembangunan masyarakat Sumatera Utara sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Dan amanat itu pulalah yang menjadi fondasi *visi* dan *misi* pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara yang bertindak sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri.

Untuk melihat, memantau, mengevaluasi, dan mengkaji bagaimana kinerja pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, diperlukan indikator-indikator kuantitatif yang terukur dan akuntabel, yang secara khusus disajikan dalam bahan paparan ini. Indikator-indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan 6 (enam) agenda ekonomi dan program prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pasca perombakan (*reshuffle*) kabinet terbatas yaitu (1) mempertahankan dan memperbaiki kondisi makro ekonomi menuju makro ekonomi yang sehat, (2) mengurangi kemiskinan dan melindungi kepada golongan ekonomi lemah dari dampak inflasi, (3) meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan moneter fiskal (pemerintah) dan pembuat kebijakan moneter ketat, (4) penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, (5) reformasi dan tatanan di bidang

anggaran, pajak termasuk sektor keuangan secara menyeluruh dan (6) good governance.

Khusus untuk beberapa agenda, BPS Provinsi Sumatera Utara belum dapat mengidentifikasinya secara eksplisit. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran dari seluruh rapat Musrenbang sangat kami harapkan guna untuk melengkapi bahan-bahan yang telah kami sajikan di sini.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya bahan-bahan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Medan, April 2006  
BPS Provinsi Sumatera Utara  
Kepala,

**H. M. Nasir Syarbaini**  
NIP. 340003769

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
EVALUASI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN 2005 .....	ix
Bab I      MEMPERTAHAKAN DAN MEMPERBAIKI KONDISI MAKRO EKONOMI MENUJU MAKRO EKONOMI YANG SEHAT .....	1
Bab II     MENGURANGI KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA EKONOMI LEMAH .....	11
Bab III    KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER .....	25
Bab IV    PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA DAN MENGURANGI KEMISKINAN .....	27
Bab V     REFORMASI DAN TATANAN DI BIDANG ANGGARAN, PAJAK TERMASUK SEKTOR KEUANGAN SECARA MENYELURUH .....	33
Bab VI    GOOD GOVERNANCE .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Realisasi Beberapa Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2005.....	xiii
Tabel 1.1	Indikator Makro Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2003-2005 .....	6
Tabel 1.2.	Indikator Perdagangan Luar Negeri, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Inflasi Sumatera Utara Tahun 2003-2005 .....	7
Tabel 1.3.	Penduduk 15 Tahun + Menurut Kejadiannya di Provinsi Sumatera Utara 2004-2005 .....	8
Tabel 1.4.	Penduduk 15 Tahun + yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Utara 2004-2005 .	9
Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999, 2002-2004 (Dalam Ribuan) .....	17
Tabel 2.2.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999, 2002-2004....	18
Tabel 2.3.	Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2000 dan 2004 .....	19
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2000 dan 2004.....	20
Tabel 2.5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 dan 2003-2005.....	21

Tabel 2.6.	Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 , 2003-2005.....	22
Tabel 2.7.	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 , 2003-2005.....	23
Tabel 2.8.	Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi BBM di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005.....	24
Tabel 4.1.	Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Tahun 2004 (Km).....	29
Tabel 4.2.	Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota Tahun 2004 (Km ).....	30
Tabel 4.3.	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Kondisi Fisik Perumahan Tahun 2000 dan 2004.....	31
Tabel 4.4.	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Perumahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 dan 2004 .....	32

# EVALUASI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2005

## Latar Belakang

Otonomi daerah sebagaimana dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, merupakan kewenangan hakiki yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang tersebut juga menyiratkan adanya upaya pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan peningkatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Walaupun demikian, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah konstelasi pelaksanaan pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomisasi tersebut, masih merupakan bagian integral dari skenario besar pembangunan nasional. Artinya, pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersifat makro harus tetap berpedoman pada kebijakan umum pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan terpadu sangat diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kemampuan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenduduk 12 juta jiwa lebih, dengan etnis dan budaya yang begitu beragam, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) tentu secara



konsisten akan melaksanakan 6 (enam) agenda dan prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu dalam lima tahun kedepan. Keenam agenda tersebut adalah : mempertahankan dan memperbaiki kondisi makro ekonomi menuju makro ekonomi yang sehat, mengurangi kemiskinan dan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, reformasi dan tatanan di bidang anggaran, pajak termasuk sektor keuangan secara menyeluruh dan good governance. Akan tetapi, karena keterbatasan data yang dimiliki BPS Provinsi Sumatera Utara, hanya aspek kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang akan dicoba dibahas/dievaluasi sedangkan yang lainnya baru sebatas pemikiran.

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diperlukan indikator-indikator kuantitatif yang terukur dan akuntabel. Hal ini penting agar silang pendapat atau kesalahan tafsir dalam menterjemahkan suksesi atau kegagalan pelaksanaan program pembangunan dapat diminimumkan.

## **Pengertian Indikator**

Secara gamblang, **indikator** dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan **petunjuk** terhadap suatu fenomena/kejadian. Dengan demikian, indikator bukanlah sesuatu yang **eksak** melainkan **angka kira-kira** yang dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun petunjuk untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap fenomena yang diamati. Sebagai

contoh ilustrasi sederhana, speedometer pada sepeda motor adalah **indikator** untuk menunjukkan kecepatan lari dari sepeda motor. Bilamana jarumnya menunjuk angka 150, berarti kecepatan lari sudah mencapai kira-kira (bukan eksak) 150 km per jam; dan bilamana kecepatan tersebut dianggap sudah berbahaya oleh si pengendara, maka ia dapat mengurangi kecepatannya.

Dari contoh ilustrasi di atas, ada dua hal penting yang terkandung dalam indikator, yaitu angka/nilai indikator itu sendiri, dan nilai ambang batas atau nilai target (*threshold value*). Nilai target, berfungsi sebagai kompas untuk menuntun dan menggiring kita ke arah mana harus berjalan. Sedangkan besaran nilai, merupakan angka realisasi pencapaian dan sekaligus menjadi alat ukur/petunjuk apakah kita sudah berada **pada, di bawah, atau di atas** nilai target. Dan inilah yang menjadi esensi indikator.

## **Evaluasi Terhadap Pencapaian Target 2005**

Untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dan pencapaian program pembangunan Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, BPS Provinsi Sumatera Utara mencoba menghitung dan menyajikan indikator-indikator terkait dengan ke 6 (enam) agenda yang telah disebutkan di atas. Dengan bantuan indikator-indikator ini, Pemprovsum dapat melihat secara kuantitatif apakah pelaksanaan program pembangunan sudah *on target* atau belum, ataukah sudah melampaui.

Untuk keperluan evaluasi, pada tabel 1 disajikan target dan realisasi beberapa indikator makro pembangunan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara umum kinerja pelaksanaan pembangunan di Sumut menunjukkan arah yang membaik. Misalnya, pada Musrenbang 2003, **tingkat kemiskinan** di Sumut pada 2004 ditargetkan sebesar 15,50 persen, tetapi realisasinya adalah 14,93 persen, atau berhasil ditekan 0,57 poin. Nilai ekspor pada tahun 2005 dicapai sebesar USD 4,56 milyar atau berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu USD 4,34 milyar. **tingkat pengangguran terbuka** 2005 ditargetkan sebesar 12,00 persen, realisasinya mencapai 10,98 persen, atau dapat ditekan 1,02 poin. **tingkat kematian bayi** tahun 2005 yang ditargetkan sejumlah 36 jiwa dalam setiap 1000 kelahiran hidup, namun realisasinya mencapai 34,2 jiwa per 1000 kelahiran hidup atau dapat ditekan 1,8 point.

Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk **pertumbuhan ekonomi**, pada tahun 2005 ditargetkan sebesar 5,95 persen, tetapi realisasi yang berhasil dicapai sebesar 5,48 persen.

Begitu juga dengan indikator lainnya yang terkait dengan aspek **kesehatan dan pendidikan** masih belum dapat dicapai seperti yang ditargetkan. Pada tahun 2004; **tingkat kesakitan penduduk** tahun 2004 ditargetkan 16,00 persen, namun kenyataannya mencapai 19,19 persen, atau meningkat 3,19 poin; **angka partisipasi sekolah (APS)** usia wajib belajar (7-15 tahun) tahun 2004 ditargetkan akan mencapai 95,5 persen, namun kenyataannya hanya mencapai 95,22 persen, atau 0,28 poin di bawah target.

## Penutup

Evaluasi terhadap pencapaian target 2005, dihitung dari data faktual yang dikumpulkan BPS dari berbagai Sensus, dan Survei, serta dari kompilasi produk-produk administrasi (kompromin) dengan menggunakan metodologi pengumpulan dan penghitungan yang jelas dan akuntabel.

Suatu hal yang ingin dikomunikasikan untuk selanjutnya didiskusikan dalam Musrenbang ini adalah penetapan indikator-indikator makro yang terkait dengan keenam agenda tersebut di atas tetapi karena keterbatasan data yang ada masih belum dapat disajikan.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Beberapa Indikator Makro Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Utara 2005**

No.	INDIKATOR	Satuan	Target 2005	Realisasi 2005	Selisih [5]-[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pertumbuhan Ekonomi <sup>1)</sup>	Persen	5,95	5,48	-0,47
2.	PDRB-Berlaku	Triliun Rp.	121,88	136,903	15,023
3.	PDRB-Konstan <sup>2)</sup>	Triliun Rp.	30,39	87,895	57,505
4.	PDRB Perkapita Harga Berlaku	Juta Rp.	9,98	11,11	1,13
5.	Inflasi	Persen	7	22,41	15,41
6.	Nilai Ekspor	Milyar US\$	4,34	4,56	0,22
7.	Nilai Impor	Milyar US\$	3,31	1,18	-2,13
8.	Nilai Tukar Petani (NTP) <sup>3)</sup>	-	102,5	95,4	-7,1
9.	IPM <sup>4)</sup>	-	69,8	71,4	1,6
10.	Penduduk Miskin <sup>4)</sup>	Persen	15,5	14,93	-0,57
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk 15 Th keatas				
	▪ Metode Baru	Persen	12,00	10,98 <sup>5)</sup>	1,02
12.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,2	68,3	0,1
13.	Tingkat kesakitan Penduduk <sup>4)</sup>	Persen	16,00	19,19	3,19
14.	Tingkat Kematian Bayi (IMR)	Per 1000 Kelahiran Hidup	36,0	34,2	-1,8
15.	Angka Partisipasi Sekolah (Wajib belajar Umur 7-15 Th) <sup>4)</sup>	Persen	95,5	95,22	-0,28
16.	Tingkat Melek Huruf (Penduduk 10 Th keatas) <sup>4)</sup>	Persen	97,3	97,05	-0,25
17.	Rata-rata Lama Sekolah <sup>4)</sup>	Tahun	9	9	0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

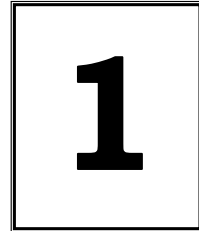
Keterangan : 1) Atas Dasar Harga Konstan 2000

2) Target dihitung Atas Dasar Harga Konstan 1993, sedangkan realisasi dihitung Atas Dasar Harga Konstan 2000

3) Rata-rata Januari-Oktober 2005 dengan metode baru

4) Keadaan tahun 2004

5) Berdasarkan data Sakernas bulan Februari 2005



## **MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERBAIKI KONDISI MAKRO EKONOMI MENUJU MAKRO EKONOMI YANG SEHAT**

Mempertahankan dan memperbaiki kondisi makro ekonomi menuju makro ekonomi yang sehat dilakukan melalui 4 (empat) pilar utama yaitu (1) pengendalian inflasi melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dan kelancaran arus/distribusi barang, (2) penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infra struktur bersifat padat karya, (3) peningkatan pertumbuhan melalui investasi dan ekspor dan (4) pembelanjaan pemerintah dimaksimalkan sesuai dengan anggaran.

### **Inflasi**

Pada tahun 2005, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 22,41 persen, jauh lebih tinggi daripada tahun 2004 yang hanya mencapai sebesar 6,80 persen. Inflasi tahun 2005 tersebut juga lebih tinggi dari inflasi Nasional yang mencapai 17,11 persen.

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (60,59 persen), diikuti oleh kelompok bahan makanan

(23,83 persen), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (16,92 persen), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (11,75 persen), kelompok sandang (8,70 persen), kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga (5,00 persen) dan kelompok kesehatan (4,66 persen).

### **Perdagangan Luar Negeri**

Pada sisi lain, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2005 juga ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor. Hal ini ditunjukkan oleh persentase perubahan neraca perdagangan luar negeri yang tercatat pada tahun 2005. Dimana neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 3,01 persen bila dibandingkan tahun 2004 dari nilainya sebesar US\$. 3.286 juta menjadi US\$. 3.385 juta.

Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2005 meningkat sebesar 7,63 persen dibandingkan tahun 2004, yakni dari US\$. 4.239 juta menjadi US\$. 4.563 juta. Ekspor produk sektor pertanian meningkat 18,73 persen, sedangkan produk industri yang merupakan penyumbang terbesar ekspor Sumatera Utara meningkat 5,08 persen.

Pada tahun 2005, nilai impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sekitar 23,56 persen dibandingkan tahun 2004, yakni dari US\$. 953 juta menjadi US\$. 1.178 juta. Peningkatan terbesar terjadi pada impor barang modal yaitu sebesar 49,24 persen, diikuti oleh bahan baku/penolong yang meningkat sebesar 21,77 persen, sedangkan barang konsumsi meningkat 10,76 persen.

Nilai impor terbesar Sumatera Utara berupa bahan baku/penolong yang nilainya mencapai US\$. 658 juta. Selanjutnya diikuti oleh barang

konsumsi yang mencapai sebesar US\$. 278 juta dan terakhir berupa barang modal yang sebesar US\$. 243 juta.

### **Angkatan Kerja dan Pengangguran**

Keadaan perekonomian yang membaik menggambarkan terciptanya kesempatan kerja. Tetapi, diakui, terciptanya kesempatan kerja belum berjalan seiring dengan penambahan jumlah pencari kerja, sehingga pengangguran masih terus bertambah. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara pada bulan Pebruari 2005 mencapai 5,8 juta orang. Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2004 sebesar 5,5 juta orang, berarti ada penambahan angkatan kerja baru sebanyak 290 ribu orang dalam enam bulan terakhir.

Penambahan angkatan kerja baru sebagian berasal dari anggota rumah tangga yang pada mulanya bukan angkatan kerja beralih menjadi angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah bukan angkatan kerja tahun 2005 di banding tahun 2004. Pada Agustus 2004 jumlah bukan angkatan kerja di Sumatera Utara sebanyak 2,5 juta orang dan pada Pebruari 2005 turun menjadi 2,3 juta orang, artinya terjadi penurunan sebanyak 264 ribu orang (Tabel 1.3).

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Pebruari 2005 mencapai 5,2 juta orang, dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2004 sebesar 4,9 juta orang, berarti ada penambahan lapangan kerja baru sebesar 264 ribu orang. Penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding penambahan angkatan kerja baru menyebabkan terjadinya penambahan jumlah penganggur. Meskipun jumlah pengangguran terbuka bertambah sebanyak 26 ribu orang, tetapi persentasenya menurun. Pada tahun 2004,



tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara sebesar 11,08 persen tetapi pada tahun 2005 menjadi 10,98 persen.

Seiring dengan mulai baiknya iklim investasi di Sumatera Utara, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara diharapkan dapat menurun dan tidak lebih dari 5 persen pada tahun 2009.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pergerakan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2005 diwarnai oleh pembangunan kembali daerah bencana pasca Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 lebih rendah dibandingkan dengan keadaan tahun 2004. Dari hasil perhitungan sangat sementara, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 mencapai 5,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dari tahun 2004 yang mencapai 5,74 persen, ataupun dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun 1997 (kondisi terakhir sebelum krisis ekonomi) yang sebesar 5,70 persen. Bahkan, lebih rendah dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,60 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara atas dasar harga berlaku menunjukkan, bahwa perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2005 umumnya digerakkan oleh sektor pertanian dimana peranannya mencapai 24,69 persen, sedangkan industri pengolahan hanya menyumbang 24,72 persen.

Akan tetapi, lebih dari separuh (50,76 persen) PDRB provinsi Sumatera Utara digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, yaitu makanan (30,63 persen dan non makanan 21,09 persen). Sedangkan

penggunaan PDRB untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 18,56 persen.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2005 lebih rendah dari tahun 2004, PDRB Perkapita ADHB Sumatera Utara tahun 2005 berhasil mencapai 11,106 juta rupiah, lebih tinggi dari tahun 2004 yang sebesar 9,74 juta rupiah

Untuk dipahami bersama, pada tahun 2005, telah dilakukan pergeseran tahun dasar perhitungan PDRB dengan mengganti tahun 1993 menjadi tahun 2000. Hal ini dilakukan didasarkan atas pertimbangan perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Dalam periode yang sama, juga telah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, yang berdampak pada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Disamping itu, ketersediaan data (*raw data*) baik harga maupun volume (quantum) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan kondisi pada tahun 1993.

**Tabel 1.1**  
**Indikator Ekonomi Makro Sumatera Utara**  
**Tahun 2003-2005**

No.	Indikator	Satuan	Keadaan		
			2003	2004*	2005**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PDRB ADH Berlaku <sup>1)</sup>	Triliun Rp.	103,4	118,10	136,90
2	PDRB ADH Konstan Tahun 2000 <sup>1)</sup>	Triliun Rp.	78,81	83,33	87,89
3	PDRB Perkapita Harga Berlaku <sup>1)</sup>	Juta Rp.	8,67	9,74	11,11
4	Struktur Ekonomi				
	- Pertanian <sup>2)</sup>	Persen	24,94	24,47	24,69
	- Industri <sup>3)</sup>	Persen	33,22	33,49	32,51
	- Jasa-jasa <sup>4)</sup>	Persen	41,84	42,04	42,8
5	PMTB (Investasi)	Triliun Rp.	16,41	20,55	25,41
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,81	5,74	5,48

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan :

- <sup>1)</sup> Data Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB tahun 2003 -2005 merupakan hasil penghitungan PDRB seri baru yang menggunakan Tahun dasar 2000. angka ini berbeda dengan hasil penghitungan PDRB seri lama yang menggunakan tahun dasar 1993.
  - <sup>2)</sup> Pertanian (Agriculture) meliputi : Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.
  - <sup>3)</sup> Industri (Manufacture) meliputi : Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; dan Bangunan
  - <sup>4)</sup> Jasa-jasa (Services) meliputi : Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan; dan Jasa-Jasa lainnya.
- \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 1.2**  
**Indikator Perdagangan Luar Negeri, Inflasi dan Nilai Tukar Petani**  
**Sumatera Utara Tahun 2003-2005**

No.	Indikator	Satuan	Keadaan		
			2003	2004	2005
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Volume Ekspor	Juta Ton	5,49	7,51	8,17
2	Nilai Ekspor	Milyar US\$	2,69	4,24	4,56
3	Volume Impor	Juta Ton	2,34	3,22	3,72
4	Nilai Impor	Milyar US\$	0,68	0,95	1,18
5	NTP	Persen	100,8	86,6	95,4 <sup>1)</sup>
6	Inflasi				
	▪ Medan	Persen	4,46	6,64	22,91
	▪ P. Siantar	Persen	2,51	7,31	19,67
	▪ Sibolga	Persen	3,94	6,64	22,39
	▪ P. Sidimpuan	Persen	4,07	8,99	18,47
	▪ Sumatera Utara	Persen	4,23	6,80	22,41
	▪ Nasional	Persen	5,06	6,40	17,11

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan :

<sup>1)</sup> Rata-rata Januari – Oktober 2005 dengan metode baru

**Tabel 1.3**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kejadiannya**  
**di Sumatera Utara Tahun 2004 – 2005**  
**(Orang)**

Kegiatan	Sumatera Utara		Perubahan 2004 ke 2005
	2004 <sup>1)</sup>	2005 <sup>2)</sup>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angkatan Kerja (a+b)	5.512.405	5.803.112	290.707
a. Bekerja	4.901.865	5.166.132	264.267
b. Pengangguran	610.540	636.980	26.440
2. Bukan Angkatan Kerja	2.527.749	2.263.896	- 263.853
3. Penduduk 15 tahun keatas ( 1 + 2 )	8.040.154	8.067.008	26.854
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK )	68,56	71,94	3,38
5. Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )	11,08	10,98	- 0,10

Sumber : Sakernas 2004-2005, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan:

1) Data Tahun 2004 pelaksanaan survei SAKERNAS bulan Agustus

2) Data Tahun 2005 pelaksanaan survei SAKERNAS bulan Pebruari

Tabel 1.4.  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Utara Tahun 2004 – 2005

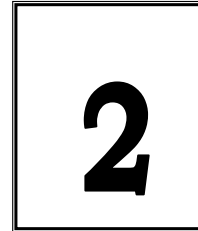
Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)		Persentase	
	2004 <sup>1)</sup>	2005 <sup>2)</sup>	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	2.525.242	2.721.353	51,52	52,68
2. Pertambangan	12.926	10.965	0,26	0,21
3. Industri	389.795	310.464	7,95	6,01
4. Listrik, Gas dan Air	21.612	13.154	0,44	0,25
5. Bangunan	183.021	208.976	3,73	4,05
6. Perdagangan	891.744	912.913	18,19	17,67
7. Angkutan	297.389	328.101	6,07	6,35
8. Keuangan	44.041	115.361	0,90	2,23
9. Jasa	536.095	544.845	10,94	10,55
<b>Jumlah</b>	<b>4.901.865</b>	<b>5.166.132</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sakernas 2004-2005, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan:

<sup>1)</sup> Data Tahun 2004 pelaksanaan survei SAKERNAS bulan Agustus

<sup>2)</sup> Data Tahun 2005 pelaksanaan survei SAKERNAS bulan Pebruari



## **MENGURANGI KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA GOLONGAN EKONOMI LEMAH**

Sampai dengan tahun 2005, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan. Hal ini, antara lain, ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Pemecahan masalah kemiskinan diutamakan melalui pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap dengan dukungan instrumen regulasi/peraturan dan dukungan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Prioritas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin; pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar khususnya melalui program penciptaan lapangan kerja dan usaha, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pangan; pengembangan sistem manajemen, memperkuat sistem monitoring dan

## *Kemiskinan*

evaluasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan, serta sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.

### **Penduduk Miskin**

Membaiknya perekonomian Sumatera Utara sepanjang tahun 2004 berdampak kepada menurunnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,8 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Angka ini mengalami penurunan baik secara absolut maupun relatif dari tahun 2003 yang mencapai 1,89 juta jiwa, atau sekitar 15,89 persen dari total penduduk Sumatera Utara.

Dibandingkan dengan angka Nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara relatif lebih rendah, dimana secara nasional terdapat 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,7 persen.

Jumlah penduduk miskin terbesar di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat sebesar 189,2 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Simalungun sebanyak 146,3 ribu jiwa dan Kota Medan sebanyak 142,6 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya 7,7 ribu jiwa, Kota Sibolga (7,8 ribu jiwa), dan Kota Tebing Tinggi (13,5 ribu jiwa).

Secara relatif, persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2004 terdapat di Kabupaten Nias Selatan, yaitu sebesar 32,15 persen, diikuti Kabupaten Nias (31,58 persen) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (31,47 persen). Persentase penduduk miskin terendah terdapat di Kota Binjai dimana hanya 6,40 persen penduduknya yang tergolong miskin,



diikuti Kota Medan (7,13 persen), dan Kabupaten Deli Serdang (7,72 persen).

Untuk tahun mendatang, persentase penduduk yang tergolong miskin di Sumatera Utara diharapkan terus menurun. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin diharapkan tidak melebihi 10 persen. Harapan ini hanya akan terwujud jika kegiatan ekonomi provinsi Sumatera Utara berkembang dengan lancar dan investasi yang ditanam untuk menggerakkan perekonomian meningkat serta kesempatan kerja terbuka lebar. Disamping itu program penanggulangan kemiskinan berlangsung secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

## **Pendidikan**

Pada bidang pendidikan, program wajib belajar 9 tahun di Sumatera Utara belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih berada di bangku sekolah baru mencapai 95,22 persen pada tahun 2004. Meskipun demikian, angka tersebut meningkat dari tahun 2003 yang hanya 95,07 persen. Kondisi yang cukup memprihatinkan justru terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun. Penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah menurun dari 98,25 persen tahun 2003 menjadi 97,64 persen pada tahun 2004. Secara umum, penduduk umur 10 tahun keatas yang masih sekolah mengalami penurunan dari 24,74 persen tahun 2003 menjadi 24,50 persen tahun 2004.

Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah yang terendah terdapat di Kabupaten Nias (89,82 persen), diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Tengah (91,15 persen), dan Kabupaten Mandailing Natal (93,70 persen), sedangkan yang tertinggi terdapat di Kabupaten

## *Kemiskinan*

Tapanuli Utara (99,44 persen), Kabupaten Toba Samosir (98,94 persen), dan Kota Pematang Siantar (98,17 persen).

Pada sisi lain, angka buta huruf di Sumatera Utara pada tahun 2004 sebesar 2,95 persen. Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang masih sekitar sepuluh persen, namun setidaknya masih ada masyarakat Sumatera Utara yang belum/tidak dapat membaca atau menulis.

Angka buta huruf tertinggi terdapat di Nias dengan persentase mencapai 12,41 persen dari jumlah penduduk usia 10 tahun keatas. Wilayah dengan angka buta huruf tertinggi lainnya adalah Asahan (5,17 persen) dan Tapanuli Tengah (4,35 persen). Sementara wilayah dengan angka buta huruf terendah adalah Tapanuli Selatan (0,61 persen), Kota Padang Sidempuan (0,65 persen), dan Kota Sibolga (0,80 persen).

## **Kesehatan**

Secara umum, baik dilihat dari angka kelahiran total (TFR), angka kematian bayi (IMR), maupun angka harapan hidup, kesehatan penduduk Sumatera Utara di tahun 2005 terlihat semakin baik dibandingkan tahun 2004.

Berdasarkan angka kelahiran total, rata-rata seorang wanita melahirkan tidak sampai tiga orang (tepatnya 2,53 orang) anak selama masa reproduksinya. Keadaan ini sedikit lebih baik dari yang dicapai pada tahun 2004 yaitu 2,67 orang. Makin rendahnya angka kelahiran mencerminkan bahwa program pemerintah untuk menekan angka kelahiran sudah berjalan seperti yang diharapkan.

Rendahya tingkat kelahiran diikuti oleh rendahnya angka kematian bayi yang berarti tingkat kesehatan terutama pasca kelahiran

sudah makin baik. Pada tahun 2005, dari seribu kelahiran terdapat 34 kasus kematian bayi. Angka ini lebih rendah dari tahun 2004 yang mencapai 37 kasus.

Makin baiknya kesehatan bayi pasca kelahiran juga meningkatkan peluang bayi untuk bertahan hidup. Berdasarkan penghitungan angka harapan hidup, rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2005 diperkirakan akan dapat bertahan hidup selama 68,3 tahun. Umur bayi yang lahir pada tahun 2005 ini sedikit lebih lama dibandingkan bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2004 lalu yang diperkirakan hanya mampu bertahan 68,2 tahun.

### **Bantuan Langsung Tunai**

Salah satu visi pembangunan nasional periode 2005-2009 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dengan salah satu sasaran pokok menurunkan jumlah penduduk miskin dari 16,7 persen tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Saat ini pemerintah menempuh dua strategi utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan : 1) meningkatkan pendapatan dan 2) menurunkan beban hidup penduduk miskin. Untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin, mulai tahun 2005 ini pemerintah berupaya antara lain menyalurkan dana kompensasi BBM secara langsung ke penduduk/rumah tangga miskin.

Sampai dengan 3 April 2006, rumah tangga miskin yang mendapat dana kompensasi BBM/dana Bantuan langsung Tunai (BLT) berjumlah

*Kemiskinan*

948.563 rumahtangga. Penyaluran dana BLT ini terbagi atas dua tahap dimana pada tahap I disalurkan kepada 639.227 rumahtangga dan pada tahap susulan disalurkan kepada sejumlah 309.336 rumahtangga.

<http://sumut.bps.go.id>

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999, 2002-2004  
(Dalam Ribuan)

Kabupaten/ Kota	1999	2002	2003	2004
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01. Nias	393,6	224,0	226,1	135,8
02. Mandailing Natal	x	88,1	85,3	80,2
03. Tapanuli Selatan	140,0	165,9	173,4	135,5 <sup>1)</sup>
04. Tapanuli Tengah	54,5	74,7	85,8	87,1
05. Tapanuli Utara	101,9	85,6	87,0	48,9
06. Toba Samosir	x	74,1	62,6	32,2
07. Labuhan Batu	150,0	130,4	143,7	131,3
08. Asahan	167,4	158,4	144,7	129,6
09. Simalungun	180,9	163,1	153,5	146,3
10. D a i r i	48,4	72,9	66,3	54,6
11. K a r o	14,4	67,1	62,5	62,1
12. Deli Serdang	201,6	203,8	170,6	117,7
13. Langkat	174,2	194,4	199,5	189,2
14. Nias Selatan	x	x	x	90,2
15. Hbg Hasundutan	x	x	x	30,7
16. Pakpak Barat	x	x	x	7,7
17. Samosir	x	x	x	26,2
18. Serdang Bedagai	x	x	x	47,8
71. Sibolga	10,8	8,5	8,0	7,8
72. Tanjung Balai	7,8	20,0	19,1	18,6
73. P. Siantar	49,9	30,3	27,2	26,2
74. Tebing Tinggi	17,8	15,1	14,6	13,5
75. Medan	240,0	93,2	143,5	142,6
76. Binjai	19,4	14,3	16,0	14,7
77. P. Sidempuan	x	x	x	23,6 <sup>1)</sup>
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>1.972,7</b>	<b>1.883,9</b>	<b>1.889,4</b>	<b>1.800,1</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

<sup>1)</sup> Angka Perbaikan

Tabel 2. 2.  
 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara  
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999, 2002-2004

Kabupaten/ Kota	1999	2002	2003	2004
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01. Nias	56.99	31,42	32.41	31.58
02. Mandailing Natal	x	23,77	23.08	21.31
03. Tapanuli Selatan	12.40	21,87	22.67	22.08 <sup>1)</sup>
04. Tapanuli Tengah	21.06	29,89	31.50	31.47
05. Tapanuli Utara	14.00	20,89	21.33	19.16
06. Toba Samosir	x	24,03	21.92	19.21
07. Labuhan Batu	16.49	15,06	15.78	14.16
08. Asahan	17.47	15,66	14.61	12.91
09. Simalungun	20.76	18,87	18.99	17.94
10. D a i r i	16.06	24,66	22.89	21.16
11. K a r o	5.02	23,20	20.35	20.00
12. Deli Serdang	10.46	9,98	8.30	7.72
13. Langkat	19.54	20,60	21.21	19.89
14. Nias Selatan	x	x	x	32.15
15. Hbg Hasundutan	x	x	x	20.11
16. Pakpak Barat	x	x	x	22.62
17. Samosir	x	x	x	21.89
18. Serdang Bedagai	x	x	x	8.20
71. Sibolga	13.30	10,10	9.34	9.01
72. Tanjung Balai	6.66	14,62	13.19	12.53
73. P. Siantar	20.91	12,28	12.14	11.55
74. Tebing Tinggi	12.89	11,94	11.01	10.10
75. Medan	11.81	4,80	7.25	7.13
76. Binjai	8.75	6,14	7.05	6.40
77. P. Sidempuan	x	x	x	13.65 <sup>1)</sup>
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>16.74</b>	<b>15.84</b>	<b>15.89</b>	<b>14.93</b>

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan: x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

<sup>1)</sup> Angka Perbaikan

**Tabel 2.3.**  
**Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota**  
**dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara**  
**2000-2004**

KABUPATEN / KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+PEREMPUAN			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01. Nias	95.40	82.20	47.60	13.79	91.31	81.88	35.43	7.70	93.47	82.05	41.16	10.34
02. Mand. Natal	97.26	88.96	50.88	12.76	97.47	82.12	68.64	7.66	97.36	85.58	60.93	9.93
03. Tap. Selatan	97.13	92.18	66.11	5.06	97.83	91.23	63.50	1.60	97.47	91.73	64.92	3.27
04. Tap. Tengah	93.54	78.71	56.49	7.19	97.95	85.97	58.91	8.20	95.70	82.05	57.57	7.72
05. Tap. Utara	100.00	97.87	79.84	12.03	100.00	99.07	89.89	16.48	100.00	98.39	83.85	13.77
06. Toba Samosir	99.48	98.48	90.41	14.54	98.19	100.00	96.05	30.43	98.80	99.20	93.09	20.87
07. Labuhan Batu	98.02	92.02	70.35	3.08	98.52	88.85	61.93	1.05	98.28	90.62	66.65	2.07
08. Asahan	98.28	82.34	48.78	4.63	98.57	87.92	51.76	6.38	98.42	85.19	50.23	5.49
09. Simalungun	97.68	89.97	66.34	13.35	98.61	91.91	75.84	8.44	98.17	90.91	71.17	10.92
10. Dairi	99.16	93.13	71.73	5.85	98.52	92.80	82.60	11.89	98.86	92.98	76.52	8.63
11. Karo	98.80	93.35	66.07	5.47	100.00	98.60	81.51	13.22	99.33	95.73	74.04	8.97
12. Deli Serdang	97.37	92.36	58.22	14.26	96.99	84.26	65.68	7.92	97.18	88.06	62.21	11.02
13. Langkat	96.08	89.49	62.99	6.59	97.18	89.50	60.28	6.56	96.61	89.49	61.74	6.58
14. Nias Selatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15. Hbg Hasundutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Pakpak Bharat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71. Sibolga	93.56	95.79	65.09	6.70	98.00	91.35	77.01	11.26	95.77	93.47	70.47	8.79
72. Tanjung Balai	98.29	83.23	51.92	8.10	98.97	91.77	62.55	9.03	98.59	87.70	56.56	8.53
73. P. Siantar	98.73	97.73	88.66	17.29	98.11	97.75	91.86	21.71	98.42	97.74	90.16	19.65
74. Tebing Tinggi	97.37	87.14	68.42	9.89	98.82	95.24	79.79	7.01	98.13	91.56	74.07	8.55
75. Medan	98.72	91.67	77.52	20.60	98.42	95.83	75.32	22.90	98.58	93.75	76.31	21.77
76. Binjai	98.17	92.96	78.47	17.44	96.85	92.41	73.25	20.67	97.52	92.69	75.66	19.10
77. P. Sidempuan	97.13	91.09	74.53	18.20	99.09	95.00	78.29	21.90	97.99	93.16	76.16	20.27
<b>SUMUT (2004)</b>	<b>97.63</b>	<b>90.33</b>	<b>65.41</b>	<b>12.10</b>	<b>97.66</b>	<b>90.24</b>	<b>67.44</b>	<b>11.41</b>	<b>97.64</b>	<b>90.28</b>	<b>66.42</b>	<b>11.75</b>
<b>2003</b>	<b>97.99</b>	<b>87.43</b>	<b>61.38</b>	<b>12.69</b>	<b>98.53</b>	<b>89.67</b>	<b>65.08</b>	<b>11.70</b>	<b>98.25</b>	<b>88.51</b>	<b>63.19</b>	<b>12.20</b>
<b>2002</b>	<b>96.91</b>	<b>86.46</b>	<b>63.46</b>	<b>12.82</b>	<b>97.01</b>	<b>88.28</b>	<b>61.40</b>	<b>14.40</b>	<b>96.96</b>	<b>87.32</b>	<b>62.49</b>	<b>13.61</b>
<b>2001</b>	<b>97.59</b>	<b>88.34</b>	<b>62.66</b>	<b>14.34</b>	<b>97.87</b>	<b>90.17</b>	<b>64.77</b>	<b>12.96</b>	<b>97.72</b>	<b>89.19</b>	<b>63.67</b>	<b>13.61</b>
<b>2000</b>	<b>96.76</b>	<b>86.38</b>	<b>62.93</b>	<b>16.12</b>	<b>97.14</b>	<b>87.09</b>	<b>63.63</b>	<b>15.59</b>	<b>96.94</b>	<b>86.71</b>	<b>63.28</b>	<b>15.85</b>

Sumber : Hasil SUSENAS 2000-2004 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004, BPS Propinsi Sumatera Utara  
Keterangan: x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

**Tabel 2.4.**  
**Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**  
**2000-2004**

KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK 10 + YANG BUTA HURUF			PENDUDUK BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P	10-18	19-49	50-64	65+
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01. Nias	8.04	16.34	12.41	4.77	10.09	32.40	52.03
02. Mand. Natal	1.12	2.27	1.71	0.34	0.70	3.75	13.80
03. Tap. Selatan	0.41	0.80	0.61	0.17	0.09	1.40	7.54
04. Tap. Tengah	2.57	6.09	4.35	2.44	2.56	9.03	30.13
05. Tap. Utara	0.88	2.32	1.58	0.14	0.20	3.82	10.44
06. Toba Samosir	1.24	4.42	2.83	0.44	0.11	5.84	21.13
07. Labuhan Batu	1.16	2.69	1.91	0.71	0.89	7.14	14.00
08. Asahan	2.51	7.83	5.17	0.28	2.42	10.99	43.74
09. Simalungun	1.62	5.68	3.67	0.31	1.28	6.58	31.44
10. Dairi	1.83	5.25	3.50	0.16	1.40	9.91	23.07
11. Karo	2.19	3.62	2.91	0.00	0.92	5.84	31.27
12. D. Serdang	1.02	4.44	2.76	0.59	1.21	7.38	26.05
13. Langkat	1.84	4.54	3.16	0.86	0.81	9.14	34.15
14. Nias Selatan	x	x	x	x	x	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x	x	x	x	x	x
16. Pakpak Bharat	x	x	x	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x	x	x	x
71. Sibolga	0.47	1.13	0.80	0.33	0.16	3.41	9.84
72. Tanjung Balai	0.35	1.85	1.08	0.00	0.32	2.39	14.29
73. Pem. Siantar	0.38	1.10	0.74	0.19	0.41	0.34	7.69
74. Tebing Tinggi	0.69	2.35	1.54	0.41	0.40	6.00	12.20
75. Medan	0.45	1.35	0.91	0.34	0.58	1.06	10.24
76. Binjai	0.53	3.23	1.89	0.57	0.60	3.69	19.54
77. Padang Sidempuan	0.08	1.20	0.65	0.15	0.11	2.61	8.46
<b>SUMUT (2004)</b>	<b>1.54</b>	<b>4.34</b>	<b>2.95</b>	<b>0.73</b>	<b>1.46</b>	<b>7.16</b>	<b>23.81</b>
<b>2003</b>	<b>1.02</b>	<b>4.04</b>	<b>2.80</b>	<b>0.60</b>	<b>1.48</b>	<b>6.72</b>	<b>22.70</b>
<b>2002</b>	<b>1.90</b>	<b>4.91</b>	<b>3.40</b>	<b>0.74</b>	<b>1.79</b>	<b>7.42</b>	<b>28.75</b>
<b>2001</b>	<b>1.46</b>	<b>5.03</b>	<b>3.25</b>	<b>0.40</b>	<b>1.42</b>	<b>9.56</b>	<b>29.98</b>
<b>2000</b>	<b>1.81</b>	<b>4.71</b>	<b>3.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Hasil SUSENAS 2004 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004, BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan: x) Masih tergabung dengan kabupaten induk



Tabel 2.5.  
Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 dan 2003-2005

Kabupaten/ Kota	TFR			
	2000	2003	2004*)	2005 <sup>e)</sup>
[1]	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	3,47	3,12	3,18	2,98
02. Mandailing Natal	x	3,23	3,35	3,09
03. Tapanuli Selatan	3,61	3,19	3,40	3,05
04. Tapanuli Tengah	3,78	3,36	3,39	3,21
05. Tapanuli Utara	3,82	3,43	3,48	3,29
06. Toba Samosir	x	3,46	3,51	3,32
07. Labuhan Batu	3,65	3,21	3,29	3,09
08. Asahan	3,44	3,13	3,17	3,02
09. Simalungun	3,10	2,76	3,01	2,67
10. D a i r i	3,79	3,30	3,36	3,15
11. K a r o	2,69	2,49	2,58	2,41
12. Deli Serdang	2,82	2,61	2,77	2,52
13. Langkat	2,83	2,63	2,78	2,53
14. Nias Selatan	x	x	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x	x	x
16. Pakpak Barat	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x
71. Sibolga	3,16	2,82	3,05	2,70
72. Tanjung Balai	3,36	3,12	3,19	3,00
73. Pematang Siantar	2,56	2,34	2,49	2,27
74. Tebing Tinggi	2,73	2,45	2,58	2,37
75. Medan	2,44	2,25	2,37	2,19
76. Binjai	2,74	2,40	2,56	2,32
77. Padang Sidempuan	x	x	2,70	2,67
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>3,16</b>	<b>2,73</b>	<b>2,96</b>	<b>2,53</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka Sementara

e) Angka estimasi

x) Tergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 2.6.  
Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 dan 2003-2005

Kabupaten/ Kota	IMR			
	2000	2003	2004*)	2005 <sup>e)</sup>
[1]	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	52,5	44,3	41,0	36,1
02. Mandailing Natal	x	57,0	57,0	56,6
03. Tapanuli Selatan	50,0	40,0	49,0	34,0
04. Tapanuli Tengah	42,0	41,0	38,3	37,7
05. Tapanuli Utara	51,0	44,0	41,5	37,3
06. Toba Samosir	x	46,5	43,0	35,7
07. Labuhan Batu	51,6	51,0	48,0	47,6
08. Asahan	52,6	48,0	48,0	45,2
09. Simalungun	40,5	38,0	36,0	34,6
10. Dairi	56,3	45,0	43,0	36,1
11. Karo	22,3	19,0	18,6	16,6
12. Deli Serdang	35,5	33,5	32,0	30,8
13. Langkat	31,0	33,0	27,0	26,6
14. Nias Selatan	x	x	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x	x	x
16. Pakpak Barat	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x
71. Sibolga	31,3	29,0	29,0	27,6
72. Tanjung Balai	60,0	49,5	45,7	38,7
73. Pematang Siantar	22,5	21,0	20,0	19,1
74. Tebing Tinggi	24,0	24,0	23,0	23,0
75. Medan	30,0	23,6	23,0	18,3
76. Binjai	28,0	25,2	25,2	23,3
77. Padang Sidempuan	x	x	35,0	33,6
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>41,0</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>	<b>34,2</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka Sementara

e) Angka estimasi

x) Tergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 2.7.  
Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) di Provinsi Sumatera Utara  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 dan 2003-2005

Kabupaten/ Kota	$e_0$			
	2000	2003	2004	2005 <sup>e)</sup>
[1]	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	63,9	66,0	67,9	68,0
02. Mandailing Natal	x	63,4	62,5	62,8
03. Tapanuli Selatan	64,7	67,1	66,4	66,6
04. Tapanuli Tengah	66,5	66,7	66,8	66,8
05. Tapanuli Utara	64,5	66,1	66,9	66,9
06. Toba Samosir	x	65,6	68,9	69,9
07. Labuhan Batu	64,0	64,7	66,1	66,2
08. Asahan	63,9	65,1	67,7	67,8
09. Simalungun	67,0	67,6	67,5	67,6
10. Dairi	61,1	66,8	66,2	66,4
11. Karo	72,9	72,8	70,1	69,7
12. Deli Serdang	68,1	68,9	68,0	68,0
13. Langkat	69,6	69,7	68,2	68,8
14. Nias Selatan	x	x	67,4	67,5
15. Humbang Hasundutan	x	x	66,2	66,2
16. Pakpak Barat	x	x	66,0	66,2
17. Samosir	x	x	67,9	68,9
18. Serdang Bedagai	x	x	67,2	67,2
71. Sibolga	69,2	69,9	69,0	69,0
72. Tanjung Balai	62,8	64,6	68,1	68,2
73. Pematang Siantar	71,8	72,3	71,0	71,3
74. Tebing Tinggi	71,7	71,5	70,1	70,3
75. Medan	69,6	71,7	69,9	69,9
76. Binjai	70,5	71,0	70,1	70,2
77. Padang Sidempuan	x	x	68,1	68,3
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>66,7</b>	<b>68,0</b>	<b>68,2</b>	<b>68,3</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : e) Angka estimasi

x) Terhubung dengan Kabupaten Induk

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi BBM**  
**di Provinsi Sumatera Utara 2005**

Keadaan : 3 April 2006

Kode	KABUPATEN/ KOTA	RT MISKIN		
		Tahap Awal	Tahap Susulan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02	Mandailing Natal	27.421	14.662	42.083
03	Tapanuli Selatan	37.117	26.901	64.018
04	Tapanuli Tengah	22.462	13.874	36.336
05	Tapanuli Utara	19.215	5.344	24.559
06	Toba Samosir	12.534	6.033	18.567
07	Labuhan Batu	38.755	18.019	56.774
08	Asahan	39.374	24.730	64.104
09	Simalungun	40.963	24.407	65.370
10	Dairi	17.802	12.581	30.383
11	Karo	18.160	13.795	31.955
12	Deli Serdang	56.113	36.400	92.513
13	Langkat	63.568	33.064	96.632
15	Humbang Hasundutan	13.312	3.004	16.316
16	Pakpak Bharat	4.188	1.459	5.647
17	Samosir	11.387	5.818	17.205
18	Serdang Bedagai	25.852	20.929	46.781
71	Sibolga	2.880	1.785	4.665
72	Tanjung Balai	5.179	4.293	9.472
73	Pematang Siantar	8.431	3.702	12.133
74	Tebing Tinggi	3.759	1.557	5.316
75	Medan	58.660	30.098	88.758
76	Binjai	4.723	3.107	7.830
77	Padang Sidempuan	6.739	3.774	10.513
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>538.594</b>	<b>309.336</b>	<b>847.930</b>
01	Nias	61.318*)		61.318
14	Nias Selatan	39.315*)		39.315
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>100.633*)</b>		<b>100.633</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>639.227</b>	<b>309.336</b>	<b>948.563</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Jumlah KKB yang diterima untuk Kab, Nias dan Nias Selatan sudah untuk tahap awal dan susulan.

# 3

## **KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER**

Dua instrumen pokok dari kebijakan makro ekonomi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah melakukan pengaturan belanja negara dan sistem perpajakan. Sedangkan melalui kebijakan moneter, pemerintah melakukan pengaturan terhadap uang beredar, kredit serta sistem perbankan.

Berdasarkan atas dua instrumen pokok tersebut, pemerintah secara terus menerus berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengendalian laju inflasi.

Pengenaan pajak yang tinggi akan cenderung mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, menurunkan permintaan agregat, dan pada akhirnya menurunkan PDB aktual. Di samping itu, pajak juga berpengaruh pada harga pasar, sehingga akan mempengaruhi pula perilaku dan insentif masyarakat.

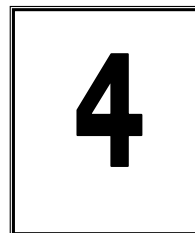
Pengubahan yang dilakukan terhadap uang beredar, akan dapat mempengaruhi berbagai variabel keuangan dan variabel ekonomi seperti tingkat suku bunga, harga saham, dan kurs. Dengan mengurangi jumlah uang beredar akan meningkatkan suku bunga serta mengurangi investasi,

### *Kebijakan Fiskal dan Moneter*

yang berarti menurunkan PDB dan inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran.

Untuk menjaga keseimbangan diantara dua instrumen pokok makro ekonomi tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi diantara pembuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

<http://sumut.bps.go.id>



## **PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA DAN MENGURANGI KEMISKINAN**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Propinsi Sumatera Utara melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, penerangan listrik PLN dan pelayanan air bersih. Pembangunan infra struktur dimaksud disamping untuk memperlancar arus/distribusi barang, juga untuk menarik investor yang nantinya akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Pada tahun 2004, panjang jalan di Sumatera Utara mencapai 33.561,78 km yang terdiri dari jalan negara 2.098,05 km, jalan propinsi 2.752,41 km, dan jalan kabupaten/kota 28.711,32 km.

Kondisi jalan negara yang baik mencapai 1.401,07 km, jalan yang sedang mencapai 362,26 km, rusak mencapai 290,08 km dan rusak berat mencapai 44,64 km. Sedangkan jalan provinsi yang dalam kondisi baik mencapai 1.729,91 km, yang sedang mencapai 599,97 km, rusak mencapai 309,22 km dan rusak berat mencapai 113,31 km. Sedangkan jalan kabupaten yang baik mencapai 8.131,14 km, yang sedang mencapai

7.135,32 km, rusak mencapai 5.506,885 km dan rusak berat mencapai 7.432,41 km.

Rumah tangga yang mendapat layanan listrik PLN mencapai 86,78 persen dari total rumah tangga di Sumatera Utara pada tahun 2004. Persentase ini meningkat dari tahun 2003 yang hanya mencapai sekitar 86,01 persen.

Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan ledeng atau air kemasan sebagai sumber air minum sebanyak 23,41 persen dari total rumah tangga di Sumatera Utara. Persentase tersebut sedikit menurun dari tahun 2003 yang mencapai sekitar 24,61 persen.



**Tabel 4.1.**  
**Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi**  
**Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004**  
**(Km)**

Keadaan	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Jenis Permukaan</b>	2.098,05	2.752,41	28.711,32	33.561,78
- Diaspal	2.095,14	2.633,76	11.620,83	16.349,72
- Kerikil	2,912	118,65	4.203,75	4.325,31
- Tanah	-	-	9.008,64	9.008,64
- Tidak Dirinci	-	-	3.878,10	3.878,10
<b>II. Kondisi</b>	2.098,05	2.752,41	28.711,32	33.561,78
- Baik	1.401,07	1.729,91	8.131,14	11.262,12
- Sedang	362,26	599,97	7.135,32	8.097,55
- Rusak	290,08	309,22	5.506,89	6.106,18
- Rusak Berat	44,64	113,31	7.432,41	7.590,36
- Tidak Dirinci	-	-	505,56	505,56

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota

**Tabel 4.2.**  
**Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004**  
**(Km)**

Kabupaten/Kota	Status Jalan			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	-	295,07	1.970,23	2.265,30
02. Mandailing Natal	292,02	123,25	1.357,06	1.772,33
03. Tapanuli Selatan	214,50	705,93	2.803,23	3.723,66
04. Tapanuli Tengah	170,41	47,45	790,27	1.008,13
05. Tapanuli Utara	117,31	176,00	1.022,05	1.315,36
06. Toba Samosir	70,05	166,00	1.120,00	1.356,05
07. Labuhan Batu	153,88	179,30	1.816,00	2.149,18
08. Asahan	134,74	121,66	1.733,60	1.990,00
09. Simalungun	142,07	165,15	1.983,90	2.291,12
10. Dairi	160,21	-	1.218,35	1.378,56
11. Karo	161,77	35,50	1.125,30	1.322,57
12. Deli Serdang	100,81	187,88	2.730,13	3.018,82
13. Langkat	88,77	152,51	1.514,75	1.756,03
14. Nias Selatan	-	131,90	-	131,90
15. Humbang Hasundutan	72,98	57,40	985,40	1.115,78
16. Pakpak Bharat	-	40,40	-	40,40
17. Samosir	-	120,00	-	120,00
18. Serdang Bedagai	53,22	19,30	2.141,55	2.214,07
19. Sibolga	8,52	-	53,05	61,57
20. Tanjung Balai	30,01	-	228,21	258,22
21..P. Siantar	16,70	12,05	313,89	342,64
22.Tebing Tinggi	15,76	4,05	166,39	186,20
23.Medan	79,52	4,51	2.951,38	3.035,41
24.Binjai	6,00	7,10	335,09	348,19
25.P. Sidempuan	8,80	-	351,50	360,30
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2.098,05</b>	<b>2.752,41</b>	<b>28.711,32</b>	<b>33.561,78</b>

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten /Kota

Tabel 4.3.  
 Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Kondisi Fisik  
 Perumahan di Sumatera Utara  
 Tahun 2000 dan 2004

Kabupaten/ Kota	Jenis Atap Terbanyak (Seng/Beton/ Genteng)		Jenis Lantai Terluas (Bukan Tanah)		Jenis Dinding Terbanyak (Tembok)	
	2000	2004	2000	2004	2000	2004
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01. Nias	47.92	53.76	89.51	88.09	16.93	19.75
02. Mandailing Natal	x	95.52	x	99.24	x	23.63
03. Tapanuli Selatan	95.99	97.04	99.14	98.67	29.85	21.99
04. Tapanuli Tengah	78.40	74.82	98.99	93.20	18.93	22.38
05. Tapanuli Utara	98.64	98.92	99.10	97.82	17.42	18.09
06. Toba Samosir	x	99.05	x	97.46	x	23.65
07. Labuhan Batu	90.77	93.07	91.21	94.66	24.62	32.89
08. Asahan	76.08	79.23	95.16	96.50	38.45	43.23
09. Simalungun	94.64	95.86	93.56	95.53	28.65	40.08
10. Dairi	98.93	98.65	96.31	95.83	13.16	13.99
11. Karo	98.67	98.43	97.51	98.43	25.80	40.39
12. Deli Serdang	86.25	89.90	93.52	96.54	58.66	57.25
13. Langkat	80.64	75.23	89.75	87.19	32.27	31.46
14. Nias Selatan	x	x	x	x	x	x
15. Hbg Hasundutan	x	x	x	x	x	x
16. Pakpak Barat	x	x	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x	x	x
71. Sibolga	91.01	92.19	98.85	97.74	35.94	37.85
72. Tanjung Balai	82.37	87.07	99.78	99.67	32.49	36.05
73. Pematang Siantar	83.69	91.11	98.51	98.85	52.24	65.13
74. Tebing Tinggi	84.59	90.62	98.68	98.36	55.26	59.21
75. Medan	97.21	97.08	99.24	97.92	70.05	74.17
76. Binjai	95.31	93.70	99.41	97.96	53.39	71.28
77. P. Sidempuan	x	99.84	x	97.68	x	59.39
<b>Sumatera Utara</b>	<b>87.83</b>	<b>88.97</b>	<b>95.36</b>	<b>95.67</b>	<b>41.08</b>	<b>44.09</b>

Sumber : Hasil SUSENAS 2000 dan 2004 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat 2000 dan 2004, BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : x) Tergabung dengan kabupaten induk

Tabel 4.4.  
 Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Perumahan  
 di Provinsi Sumatera Utara  
 Tahun 2000 dan 2004

Kabupaten/ Kota	Sumber Penerangan (Listrik Pln)		Sumber Air Minum (Ledeng/Air Kemasan)		Tempat Pembuangan Tinja (Tangki)	
	2000	2004	2000	2004	2000	2004
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01. Nias	31.39	38.83	1.95	1.74	3.07	1.68
02. Mandailing Natal	x	65.49	x	5.89	x	9.51
03. Tapanuli Selatan	70.27	66.06	8.27	0.41	12.28	13.18
04. Tapanuli Tengah	61.04	66.52	16.91	22.06	12.75	16.50
05. Tapanuli Utara	88.84	88.63	10.43	12.37	30.49	24.80
06. Toba Samosir	x	96.35	x	12.81	x	38.20
07. Labuhan Batu	75.75	81.88	12.21	12.83	34.63	33.93
08. Asahan	72.85	87.81	11.31	12.58	21.39	32.74
09. Simalungun	79.86	94.98	30.84	27.96	27.18	33.76
10. D a i r i	79.70	79.56	28.10	16.82	30.92	33.99
11. K a r o	90.92	91.22	46.03	29.66	44.14	50.57
12. Deli Serdang	95.31	94.88	22.34	13.53	57.62	60.61
13. Langkat	91.40	89.76	10.24	11.49	20.89	32.55
14. Nias Selatan	x	x	x	x	x	x
15. Hbg Hasundutan	x	x	x	x	x	x
16. Pakpak Barat	x	x	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x	x	x
71. Sibolga	98.19	99.31	87.00	80.21	41.43	36.63
72. Tanjung Balai	96.09	93.28	90.59	92.51	67.97	76.37
73. P. Siantar	98.68	99.51	92.43	92.93	70.53	87.01
74. Tebing Tinggi	97.70	96.88	21.56	24.01	80.13	80.26
75. Medan	99.07	99.06	66.33	62.81	84.94	84.69
76. Binjai	95.43	96.92	16.49	13.85	68.67	64.94
77. P. Sidempuan	x	95.01	x	22.01	x	37.72
<b>Sumatera Utara</b>	<b>83.86</b>	<b>86.78</b>	<b>28.02</b>	<b>23.41</b>	<b>42.37</b>	<b>45.21</b>

Sumber : Hasil SUSENAS 2000 dan 2004 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat 2000 dan 2004, BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan :x) Terhubung dengan kabupaten induk

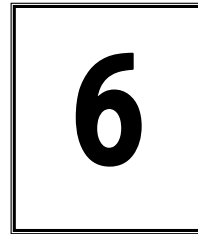
# 5

## **REFORMASI DAN TATANAN DI BIDANG ANGGARAN, PAJAK TERMASUK SEKTOR KEUANGAN SECARA MENYELURUH**

Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi adalah bagian dari prinsip *Good Governance* yang diterapkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah.

Reformasi dan penataan di bidang anggaran, pajak dan sektor keuangan secara menyeluruh diperlukan untuk mempercepat terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran. Dimulai dari penyusunan anggaran yang tidak tumpang tindih antar instansi pengguna anggaran hingga evaluasi penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Akan tetapi, karena belum adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi dan penataan tersebut, mengakibatkan pencapaiannya tidak dapat diketahui secara kuantitatif. Untuk itu, perlu disusun suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya.



## GOOD GOVERNANCE

Dalam penciptaan *good governance*, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat 8 (delapan) Perintah Harian yang salah satunya adalah “melanjutkan kegiatan dalam mewujudkan *good governance*”, sebagaimana yang terdapat dalam pidato Gubernur Sumatera Utara dalam pelantikan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2002. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara mencanangkan 10 (sepuluh) Prinsip *Good Governance*, yaitu: Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke Depan, Partisipasi, dan Penegakan Hukum.

Pada tahun 2005, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agenda utamanya mewujudkan penyelenggaraan negara yang professional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan aktivitas aparatur pemerintahan yang didasari moral, etika, integritas, profesionalisme dalam pengabdian, pengayoman, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan memperbaiki sistem pengawasan.

Akan tetapi, karena belum adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut, mengakibatkan pencapaiannya tidak dapat diketahui secara kuantitatif. Sehubungan dengan itu, perlu segera disusun suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing instansi.

<http://sumut.bps.go.id>

*BPS*

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara**

Jl. Asrama No. 179 Medan Telp. (061) 8452343 Fax. (061) 8452773

E-mail: [bps1200@medan.wasantara.net.id](mailto:bps1200@medan.wasantara.net.id)

Homepage: <http://www.regional.bps.go.id/~sumut>